

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Faktor utama dalam mengukur efektivitas pembangunan sebuah negara adalah dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang merupakan proses peningkatan output dari waktu ke waktu. Selain itu pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan barang dan jasa di masyarakat, sehingga dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan hasil produksi dan pendapatan. Indikator dari keberhasilan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Efendi & Aimon, 2024).

Provinsi Bali dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di Indonesia, dengan kontribusi sektor ini yang sangat signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pariwisata menjadikan struktur ekonomi Bali rentan terhadap guncangan eksternal, sebagaimana terlihat pada saat pandemi COVID-19. Dampak tersebut menegaskan pentingnya diversifikasi ekonomi dan pergeseran menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah.

Ketimpangan pendapatan, perbedaan kualitas hidup antarwilayah, serta tingkat pengangguran yang masih tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif. Meskipun pariwisata menyediakan banyak lapangan kerja dan mendongkrak pendapatan, manfaatnya sering kali terkonsentrasi di daerah pusat wisata seperti Badung dan Denpasar, sementara wilayah lain seperti Karangasem dan Bangli masih tertinggal. Untuk itu, diperlukan strategi pembangunan ekonomi yang menasar penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan perbaikan infrastruktur. Bali memiliki karakteristik ekonomi yang unik, dengan ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pariwisata. Namun, dinamika

ekonomi Bali tidak lepas dari berbagai faktor makroekonomi lainnya yang juga mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB.

PDRB ADHK Provinsi Bali tahun 2019-2023 menunjukkan adanya ketimpangan pertumbuhan antarwilayah. Kabupaten Badung, sebagai pusat pariwisata, mengalami penurunan tajam saat pandemi sebelum pulih kembali, sedangkan daerah seperti Karangasem dan Bangli menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat. Ini menegaskan pentingnya menganalisis kontribusi indikator ekonomi inklusif terhadap pembangunan ekonomi. Pemberdayaan desa wisata dan pengembangan sektor ekonomi kreatif menjadi alternatif strategis untuk memperluas basis ekonomi dan mengurangi ketimpangan. Astuti et al. (2021) menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus melestarikan budaya dan lingkungan.

Analisis hubungan antara variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Gini Rasio, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan langkah penting dalam memahami struktur dan dinamika pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali secara lebih menyeluruh. Penggunaan variabel TPT, misalnya, mencerminkan kapasitas sektor ekonomi untuk menyerap angkatan kerja yang tersedia. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum berhasil menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat, terutama di luar sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Bali. Oleh karena itu, menurunkan TPT menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi yang tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga inklusif secara sosial. Peningkatan lapangan kerja yang produktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan sosial.

Selanjutnya, Gini Rasio sebagai ukuran ketimpangan pendapatan memberikan gambaran tentang distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi. Nilai

Gini yang tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir kelompok masyarakat, biasanya yang tinggal di pusat-pusat pariwisata seperti Denpasar dan Badung, sedangkan masyarakat di wilayah pinggiran seperti Karangasem, Bangli, dan Jembrana masih mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan dasar. Ketimpangan ini dapat menciptakan eksklusi sosial, menurunkan kohesi sosial, dan dalam jangka panjang menghambat stabilitas pembangunan. Oleh karena itu, mengurangi ketimpangan melalui redistribusi pendapatan, peningkatan akses layanan publik, dan pemerataan investasi antarwilayah merupakan agenda penting dalam pembangunan ekonomi Bali yang berkeadilan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga memainkan peranan krusial dalam konteks pembangunan yang inklusif. Tingginya TPAK dapat diartikan sebagai tingginya minat dan keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi, yang apabila diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang sesuai, akan meningkatkan produktivitas daerah. Namun, partisipasi tenaga kerja yang tidak dibarengi dengan kualitas dan keterampilan kerja yang memadai justru dapat menyebabkan peningkatan pekerjaan informal dan underemployment. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan vokasional, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan indikator komposit dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, menjadi refleksi kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Meningkatnya IPM secara langsung dapat memperkuat daya saing ekonomi suatu daerah karena masyarakat yang sehat, terdidik, dan sejahtera memiliki kapasitas lebih tinggi dalam berkontribusi terhadap pembangunan. Di Bali, disparitas IPM antarwilayah menjadi sorotan karena masih adanya daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Oleh sebab itu, meningkatkan IPM secara merata sangat penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Dengan menganalisis keterkaitan antara keempat variabel tersebut dengan PDRB, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana pembangunan ekonomi di Provinsi Bali dapat diarahkan tidak hanya untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Temuan dari studi ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berpihak pada kelompok rentan dan wilayah tertinggal, seperti melalui pemberdayaan desa wisata, pengembangan ekonomi kreatif, dan peningkatan infrastruktur dasar. Pemilihan variabel TPT, Gini Rasio, TPAK, dan IPM sebagai indikator utama dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pembangunan ekonomi Bali yang berkelanjutan

1. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT):** TPT mencerminkan seberapa mampu sektor ekonomi menyerap tenaga kerja. Pengangguran yang tinggi menjadi tanda lemahnya penciptaan lapangan kerja dan dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini penting di Bali, yang perekonomiannya sangat bergantung pada sektor pariwisata yang rawan guncangan, seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, TPT berfungsi sebagai indikator untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi juga dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai.
2. **Gini Rasio:** Dipakai untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan antarwilayah atau kelompok masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat, terutama di daerah pusat wisata seperti Badung dan Denpasar, menimbulkan kesenjangan dengan wilayah lain seperti Bangli dan Karangasem. Ketimpangan ini dapat menimbulkan masalah sosial dan melemahkan stabilitas ekonomi jangka panjang. Karena itu, Gini Rasio penting untuk menilai apakah pertumbuhan ekonomi di Bali bersifat inklusif dan adil.
3. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK):** Menunjukkan sejauh mana penduduk usia kerja aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Partisipasi

tenaga kerja yang tinggi menjadi sinyal positif terhadap kinerja perekonomian dan potensi pertumbuhan daerah. Bali, dengan struktur ekonomi berbasis jasa, tingginya TPAK dapat membantu mendukung pemulihan dan diversifikasi ekonomi di luar sektor pariwisata.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Menjadi indikator penting yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Bali yang memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi kreatif dan pariwisata sangat bergantung pada kualitas SDM untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi. IPM juga membantu melihat apakah hasil pembangunan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana indikator-indikator makroekonomi tersebut memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan memahami hubungan tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam rangka mempercepat pemulihan dan penguatan ekonomi Bali ke depan. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menjawab permasalahan mengenai pengaruh variabel TPT, Gini Rasio, TPAK, dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, yang diukur melalui PDRB ADHK, dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data time series. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi daerah serta menjadi referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, selanjutnya rumusan masalah adalah pengaruh makroekonomi, pada tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan, partisipasi angkatan kerja, dan indeks pembangunan manusia, terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu fokus pada empat indikator makroekonomi (tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan, partisipasi angkatan kerja, dan indeks pembangunan manusia) di Provinsi Bali, dengan rentang waktu dari tahun 2019-2023. Analisis pada aspek pembangunan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali, dan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui indikator makroekonomi (tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan, partisipasi angkatan kerja, dan indeks pembangunan manusia) di Provinsi Bali, dengan rentang waktu dari tahun 2019-2023. Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)

E. Manfaat / Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini dapat dibagi menjadi dua manfaat aspek utama:

1. Manfaat Teoritis: Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan konsep ekonomi inklusif. Penelitian ini akan memperkaya literatur ilmiah tentang hubungan antara indikator makroekonomi dengan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Bali. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Manfaat Praktis: Secara praktis, penelitian ini memiliki beberapa manfaat signifikan.

- a. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi.
- b. Bagi pemangku kepentingan ekonomi, penelitian ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

